

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerajaan Arab Saudi dan Republik Yaman memiliki sejarah hubungan yang kurang harmonis dengan adanya sengketa maupun intervensi beberapa kali terjadi di antara kedua pihak yang tidak dapat dipisah dari faktor historis dan politis. Bahkan sejak negara Yaman masih terbagi menjadi Yaman Utara dan Yaman Selatan, Arab Saudi mengeluarkan dana untuk mendukung Yaman Selatan agar tidak melakukan unifikasi dengan Yaman Utara. Hal ini disebabkan Arab Saudi dan Yaman Utara memiliki garis perbatasan darat sepanjang 1500 km dan Yaman Utara merupakan daerah mayoritas masyarakat berkeyakinan Syiah yang tidak satu keyakinan dengan Arab Saudi. Namun sengketa perbatasan antara Arab Saudi dan Yaman berakhir pada tahun 2000 (Buringa, 2017). Sengketa atas wilayah dan batas-batas negara antara dua negara tersebut ditengahi dengan adanya penandatanganan perjanjian Jeddah (Feierstein, 2019).

Walaupun sengketa wilayah Yaman dan Arab Saudi telah usai, intervensi Arab Saudi masih terus berlanjut. Pada tahun 2004 Arab Saudi turut andil membantu pemerintah Yaman untuk menyelesaikan konflik sipil antara pemerintah dan kelompok anti pemerintah Sabab Al-mukminin yang beraliran Syiah (Service, 2019). Sabab Al-mukminin melakukan demonstrasi melawan pemerintah yang berujung pada penangkapan pemimpinnya, Hussein Badr Ad-din al Houthi. Kelompok Sabab Al-mukmini merupakan cikal bakal yang nantinya menjadi kelompok Houthi.

Intervensi Arab Saudi terhadap konflik Yaman mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2009. Arab Saudi secara terbuka melakukan operasi militer terhadap

kelompok Houthi. Di sisi yang sama, militer pemerintah Yaman diperbolehkan untuk masuk ke dalam wilayah Arab Saudi untuk menekan perlawanan Houthi dari perbatasan Arab Saudi-Yaman. Konflik terus berlanjut hingga pada tahun 2011 Yaman terkena dampak dari Arab Spring yang menyebabkan Yaman dilanda gelombang protes dan kerusuhan sipil (Halim, 2019). Sejak saat itu situasi keamanan di negara tersebut terus memburuk. Kerusuhan tersebut menuntut adanya reformasi politik dan konsesi ekonomi yang berujung pada turunnya presiden Ali Abdullah Saleh yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun dan digantikan oleh wakilnya Abd Rabbuh Mansur Hadi (Nunlist, 2015).

Pada tahun 2015 Yaman kembali mengalami krisis politik yang panjang dan juga kompleks. Krisis yang diawali dari masyarakat yang memprotes kebijakan-kebijakan Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi berubah menjadi konflik bersenjata. Kelompok Houthi menggunakan momentum tersebut untuk memantik konflik yang terjadi. Kemudian kondisi pemerintahan yang tidak stabil akibat konflik yang terjadi dimanfaatkan oleh kelompok Houthi untuk melakukan kudeta dan menguasai Yaman. Kelompok Houthi menekan Mansur Hadi mengundurkan diri dari kursi presiden dan pada waktu yang sama kelompok Houthi juga menguasai ibu kota Sana'a.

Setelah lengser dari jabatan, Presiden Mansur mencari perlindungan dengan terbang ke Arab Saudi. Strategi melarikan diri menjadi salah satu tindakan yang dinilai tepat karena situasi domestik Yaman pada saat itu cenderung akan membahayakan keselamatan Mansur Hadi. Lalu setelah situasi cukup aman bagi Mansur Hadi dengan adanya perlindungan dari Arab Saudi, pada 24 Februari 2015 Mansur Hadi menarik kembali usulan pengunduran dirinya. Mansour Hadi kemudian meminta bantuan Arab Saudi beserta negara-negara koalisi Arab. Tindakan Mansour Hadi dilanjutkan dengan mengirimkan surat ke

Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan intervensi militer dengan alasan sebagai tindakan bertahan atau *self-defense*. Pasca surat diterima oleh DK PBB, Arab Saudi langsung membentuk koalisi Operation Decisive Storm (ODS) atau Amaliyyah Asifatul al-Hazm pada 26 Maret 2015 (Putera, 2018).

Operation Decisive Storm merupakan operasi militer yang diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi dengan menggalang bantuan dari negara aliansinya yaitu Mesir, Yordania, Sudan, Uni Emirat Arab, Maroko, Turki, Qatar, Bahrain dan Kuwait (Fink, 2017). Dalam operasi tersebut Arab Saudi berkontribusi mengirimkan 100 pesawat perang dan 150.000 pasukan. Selain itu, pesawat perang dari negara aliansi juga turut ikut dalam operasi. Uni Emirat Arab mengirimkan tiga puluh jet tempur, Kuwait dan Bahrain mengirimkan lima belas, Qatar sepuluh, Yordania dan Maroko masing-masing mengirimkan enam dan Sudan mengirimkan empat. Mesir juga mengirimkan empat kapal perang pada awal ODS dilaksanakan untuk mendukung blokade laut Arab Saudi. Selain bantuan dari negara teluk dan beberapa negara lain, Amerika Serikat juga turut andil dalam operasi tersebut namun tidak secara langsung melainkan dengan mengirimkan bantuan logistik dan juga bantuan intelijen.

Tanpa menunggu jeda yang terlalu lama setelah Arab Saudi secara resmi membentuk ODS, Arab Saudi dan Mesir bekerja sama dalam operasi laut di Teluk Aden dengan menggunakan empat kapal angkatan laut Mesir. Selain itu Arab Saudi juga meminta akses wilayah udara dan perairan Somalia untuk mendukung jalannya blokade (Somali Current, 2015). Operasi laut kemudian dilanjutkan pada 27 Maret 2015 satu kuadron kapal perang Mesir dan Arab Saudi telah menempati posisi blokade di Selat Bab, el Mandeb. Blokade laut dilaksanakan dengan tujuan untuk menghentikan segala aktivitas kapal keluar masuk wilayah Yaman. Bahkan Arab Saudi mengancam akan

menghancurkan kapal yang berani membuka pelabuhan. Selain itu Arab Saudi juga melakukan serangan udara ke kota. Selain itu serangan udara juga dilakukan pada 26 Maret 2015 dengan target serangan pangkalan udara Al Anad yang direbut oleh Houthi seminggu sebelumnya. Selain itu, koalisi juga terlibat dalam serangan darat satu sama lain dengan pasukan Houthi. Tercatat antara 31 Maret hingga awal April, pasukan Arab Saudi dan Houthi saling serang menggunakan artileri dan roket di perbatasan Arab Saudi dan Yaman. Kegiatan saling serang terus terjadi hingga pada 21 April 2015 Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa Operation Decesive Storm dihentikan. Arab Saudi menilai bahwa serangan udara yang dilakukan telah melenyapkan ancaman dari rudal balistik dan senjata berat yang dimiliki Houthi. Namun kenyataannya Arab Saudi justru melancarkan operasi baru dengan nama Operation Renewal of Hope/Operation Restoring of Hope (Saudi Embassy USA, 2015).

Berbeda dengan operasi sebelumnya, Operation Restoring of Hope merupakan operasi yang dijalankan dengan fokus pada proses politik untuk membawa Yaman menjadi stabil dan aman. Selain itu, intervensi militer justru tetap dijalankan walaupun Operation Decisive Storm telah dihentikan. Aksi militer didukung dengan perintah Raja Salman kepada Saudi National Guard untuk ikut dalam operasi militer. Pada saat itu serangan udara dan laut tetap dijalankan untuk menasar basis militer dan pertahanan Houthi. Pada tahun 2017 Koalisi Arab juga menahan bantuan humaniter asing yang melalui jalur laut sehingga tidak dapat masuk ke wilayah Yaman. Arab Saudi beralih bahwa penghentian distribusi dilakukan agar tidak ada penyeludupan senjata melalui kargo logistik yang masuk ke dalam Yaman (JPNN, 2019). Saling serang antara kedua belah pihak terus terjadi, hingga pada 4 November 2017 Houthi melancarkan serangan ke Ibu Kota Riyadh tepatnya ke Bandara. Serangan tersebut kemudian direspons Arab

Saudi dan negara Koalisi dengan melakukan Blokade laut, darat dan udara Yaman sebagai balasan tanpa memikirkan dampak yang terjadi selama blokade berlangsung (Saptohutomo, 2017).

Arab Saudi menuai banyak protes dari masyarakat internasional karena blokade yang dilakukan oleh Arab Saudi telah menyebabkan permasalahan di Yaman menjadi semakin rumit. Kondisi impor komoditas pangan dilanda krisis besar akibat blokade yang dilakukan. Akibatnya, pada tahun 2018 PBB memperingatkan bahwa 13 juta penduduk menghadapi kelaparan yang bahkan paling buruk dalam seratus tahun (BBC, 2018). Sedangkan pada tahun sebelumnya lebih dari 50.000 anak-anak meninggal akibat kelaparan (Associated Press, 2017). Sedangkan PBB melaporkan bahwa angka tersebut dapat lebih tinggi karena banyak data yang tidak masuk dari masyarakat Yaman (UN News, 2018). Selain makanan, blokade menjadikan kebutuhan medis mengalami kelangkaan sehingga turun menyebabkan berbagai penyakit timbul (Saul S. G., 2017). Hal ini menyebabkan pada Oktober 2016 pejabat kesehatan Yaman mengkonfirmasi bahwa terdapat 100.000 kasus kolera karena buruknya air dan sistem sanitasi. Sedangkan pada tahun pertama blokade, OCHA melaporkan bahwa terjadi pandemik demam berdarah yang menewaskan 113 orang dan menginfeksi 4000 orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijabarkan di atas maka untuk memudahkan penulis dalam memecahkan masalah dan juga menjadi pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat ditarik sebuah rumusan masalah “Mengapa Arab Saudi melakukan blokade terhadap Yaman

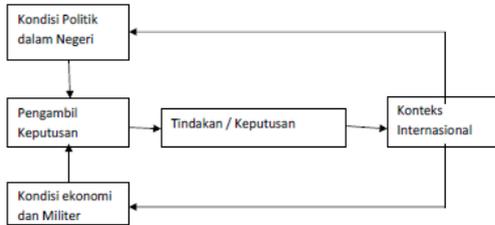
C. Dasar Pemikiran

Rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas akan dijawab dengan menggunakan bantuan konsep sebagai berikut:

1.1 *Decision Making Theory*

Salah satu teori yang digunakan dalam menganalisis latar belakang suatu negara dalam mengambil keputusan adalah teori pengambilan keputusan yang disampaikan oleh William D Coplin. Teori ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis masalah yang terjadi (Mas'ood, 1994). Menurut Coplin, tindakan politik atau kebijakan luar negeri suatu negara merupakan sebuah akibat dari tiga pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi para stackholder dalam memutuskan kebijakan luar negeri.

Kondisi politik dalam negeri merupakan salah satu dari tiga hal tersebut. Kondisi politik dalam negeri termasuk di dalamnya faktor budaya seperti agama dan tradisi yang berjalan di suatu negara yang menjadi dasar tingkah laku politikus dalam mengambil keputusan. Kedua, kondisi militer dan ekonomi dari negara tersebut, di dalamnya termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam keamanan dan pertahanan negara. Ketiga yaitu konteks internasional, maksudnya adalah kondisi di negara yang menjadi target atau tujuan politik luar negeri dan juga pengaruh dari negara lain yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi (Coplin, 1992). Teori Coplin selanjutnya dapat dilihat melalui gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1

a. Politik dalam Negeri

Politik domestik merupakan faktor yang memberikan dampak yang cukup luas dan besar terhadap politik luar negeri. Adanya perbedaan dalam suatu negara dalam menjalankan pemerintahannya, baik menggunakan sistem demokratis, autokrasi, terbuka, ataupun tertutup akan mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri diambil. Selain itu stabilitas negara dan juga kondisi dalam negeri dipertimbangkan sebagai patokan untuk mengambil keputusan yang dilaksanakan dalam bentuk kebijakan. Namun Politik luar negeri bukanlah satu-satunya hal yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dan juga merumuskan keputusan.

William D Coplin menganalisis dengan fokus pada hubungan antar para pengambil keputusan luar negeri dengan para aktor yang ikut terlibat, yang berusaha memberikan pengaruh pada perilaku politik luar negeri. Pada analisisnya Coplin menyebut sebagai *policy influencers* bagi aktor-aktor yang memberikan pengaruh atau konsiderans dalam pengambilan kebijakan atau keputusan luar negeri. Pengambilan keputusan ini akan menuntun ke mana arah kepentingan nasional, memberikan aturan strategi, membentuk serta mengevaluasi kebijakan yang telah lahir dan diadopsi sebelumnya (Marbun, 2003).

Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokrasi maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dll. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

Policy Influencer memiliki empat tipe menurut Coplin yaitu *Bureaucratic Influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer* dan *Mass Influencer*.

Pertama, *Bureaucratic Influencer* merupakan tipe yang menjelaskan berbagai individu dan organisasi di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu dan memberikan pandangan kepada para pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Kelompok individu birokrat ini akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan.

Kedua, *Partisan Influencer* merupakan tipe yang mengumpulkan lalu menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan yang bersifat politis. Tuntutan ini kemudian diarahkan kepada para pengambil kebijakan/keputusan.

Ketiga, *Interest Influencer* adalah tipe yang terdiri dari beberapa orang atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Namun tidak seluas dan sebesar partai dalam aktifitasnya. Namun kelompok ini sangat

dibutuhkan untuk menyerahkan sumber sehingga mendapat dukungan dari pengambil keputusan.

Keempat, pada tulisan ini penulis menggunakan tipe *Mass Influencer*. Tipe ini merupakan tipe yang memiliki pengertian bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada opini yang terjadi di masyarakat. Opini ini kemudian menyebabkan para pengambil keputusan mempertimbangkan aspirasi ataupun kondisi yang ada. Sedangkan opini masyarakat dapat dipengaruhi dengan adanya media. Dampak dari adanya tipe ini dapat beragam tergantung dengan sistem politik yang dimiliki oleh suatu negara.

Teori William D Coplin tersebut diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem politik. Menurut Easton, Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negara atau dalam bahasan Easton disebut sebagai *input*. *Input* tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politis, baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan di lembaga politik.

b. *Kondisi Ekonomi dan Militer*

Pengambilan keputusan luar negeri harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan juga militer. Ekonomi yang dimaksud adalah kekuatan pada sektor kemampuan ekonomi negara sehingga kebijakan yang diambil tidak merugikan. Sedangkan sektor militer yang dimaksud adalah sejauh mana kekuatan militer dari sebuah negara dapat menopang dan mendukung kebijakan luar negeri. Ketika negara sudah dapat

mengindikasikan kekuatan baik ekonomi maupun militer. Maka pengambil keputusan dapat menentukan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar sehingga kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Sektor ekonomi dan sektor militer adalah kekuatan yang penting dalam sebuah negara. Kekuatan serta kelemahan ekonomi dapat dilihat dari GNP (*Gross National Product*) per kapita dan stabilitas neraca pembayaran sebuah negara. Sedangkan untuk mengukur kekuatan militer sebuah negara dapat diperhatikan dari kekuatan militer pada sektor anggota militer, alutsista dan juga pendanaan negara yang dikeluarkan untuk belanja tahunan militer. Selain itu dapat dilihat sejauh mana tingkat ketergantungan suatu negara terhadap negara lain dalam sektor militer dan tingkat kestabilan internal atau dalam negeri suatu negara.

Selain itu, William D Coplin membagi jenis negara menjadi dua jenis atau kategori negara terbelakang dan negara maju. Pembagian ini bermaksud untuk memudahkan faktor-faktor ekonomi dan militer yang telah disebutkan sebelumnya. Negara maju memiliki tingkat relatif tinggi dalam nilai GNP. Hal ini didukung dengan adanya variasi produksi, kepemilikan angkatan bersenjata terlatih yang cukup atau bahkan lebih dan juga terlibat dalam *international trade*.

Disisi lain negara terbelakang memiliki GNP yang cenderung rendah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ketergantungan ekonomi terhadap negara lain dan angkatan bersenjata yang sedikit atau bahkan kurang terlatih dan minimnya alutsista yang dimiliki. Perbedaan yang mencolok antar dua jenis negara tersebut akan mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri akan diambil. Negara maju cenderung akan unggul karena memiliki kekuatan untuk menginvasi

atau menyatakan perang terhadap negara terbelakang dan juga memonopoli sektor maupun sumber ekonomi negara terbelakang.

c. *Konteks Internasional*

Konteks internasional adalah konsep yang menerangkan mengapa sebuah negara memiliki perilaku tertentu yang berbeda-beda terhadap negara lain. Konsep ini berhubungan dan berkaitan dengan kondisi geopolitik suatu negara. Peneliti berhaluan realis seperti Hans J Morgenthau berpendapat bahwa semua negara memiliki hubungan tertentu yang khas dengan aktor internasional atau lingkungan internasional yang difungsikan sebagai perangkat keinginan atau kepentingan objektif sebuah negara (kepentingan nasional). *National interest* ini yang kemudian mempengaruhi dalam penentuan kekhasan kebijakan luar negeri terhadap negara lain yang berbeda-beda. Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Melalui konsep konteks internasional pengambil keputusan juga dapat menentukan mana yang akan menjadi kawan dan lawan.

William D Coplin menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi dasar dalam memetakan konsep konteks internasional yaitu faktor geografis, ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan karena lingkungan internasional semua negara bangsa adalah daerah/wilayah yang saling berhubungan satu sama lain –dalam hal ini negara yang sah yang berdiri dalam satu wilayah tertentu biasanya akan memiliki kesamaan-kesamaan baik budaya ataupun faktor geografis, kepentingan ekonomi dan politik. Kesamaan-kesamaan inilah yang kemudian menghasilkan sekumpulan negara dalam suatu organisasi internasional. Namun biasanya faktor geografis akan memiliki tingkat peran

yang lebih tinggi dibandingkan faktor lain sebagai contoh terbentuknya organisasi dengan kesamaan tujuan seperti ASEAN, NATO, Pakta Warsawa, Uni Eropa, NATO dll.

1.2 Geopolitik

Frederich Ratzel (1844-1904) adalah ilmuwan politik yang mencetuskan istilah geopolitik. Geopolitik memiliki arti ilmu yang mempelajari bumi politik atau *political geography*. Kemudian teori geopolitik dielaborasi menjadi lebih luas oleh Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer menjadi politik geografi atau *geographical politic*. Istilah tersebut memiliki perbedaan pada fokus diskursusnya. *Political geography* atau ilmu bumi politik menjelaskan tentang fenomena geografis dalam sektor politik. Pada sisi lain, geopolitik atau *geographical politic* menjelaskan tentang fenomena politik dari aspek geografis. Terdapat dua pengertian dalam konsep geopolitik, pertama geopolitik sebagai ilmu dan geopolitik sebagai ideologi. Geopolitik sebagai ilmu merupakan wawasan atas posisi kita sebagai suatu bangsa atau negara yang bertahan hidup saling berdampingan dan saling berhubungan dalam interaksi internasional. Sedangkan pengertian geopolitik sebagai ideologi adalah faktor geografis menjadi landasan dan kesepakatan kolektif negara dalam menjalankan, menjaga dan mempertahankan sumber daya dan semangat kebangsaan yang dimiliki (Nugroho, 2014).

Dunia memiliki dua arus utama pandangan terhadap geopolitik yaitu geopolitik dilihat dari sisi maritim atau perairan dan geopolitik yang dilihat dari sisi kontinental atau daratan. Kedua pandangan tersebut menghadirkan area untuk mengembangkan kekhasan struktur geopolitik (Cohen, 2009). Peradaban, budaya dan institusi politik yang berkembang dengan

menggunakan dua pandangan ini secara fundamental akan berbeda secara ekonomi, budaya dan tradisi serta semangat dan pandangan terhadap geopolitik (Nugroho, 2014).

Pada tulisan ini teori geopolitik yang akan digunakan adalah *Sea Power Theory* atau teori Mahan. teori ini merupakan buah pikiran dari Admiral Mayer Tahan (Mahan) dari Amerika Serikat yang tidak sepakat dengan teori Heartland yang lebih berfokus pada penguasaan geopolitik darat. Mahan dalam bukunya *The Influence of Sea Power upon History 1660-1783* menjelaskan bahwa terdapat enam syarat yang harus dipenuhi sebuah negara untuk mengembangkan *sea power* yaitu kedudukan geografis, bentuk tanah dan pantai, luas wilayah, karakter nasional, karakter institusi pemerintahan dan penduduk. Mahan menyampaikan bahwa ketika sebuah negara dapat menguasai sektor laut seperti Terusan Suez, Selat Gilbatar atau Panama maka penguasaan tersebut merupakan sebuah keuntungan besar. Faktanya jalur perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut begitu pula dengan distribusi logistik, Teori ini memiliki asumsi bahwa untuk meraih keuntungan geopolitik, sebuah negara harus menguasai kekuatan perairan atau laut.

1.3 Blokade

Menurut Alexander Holtzoff, Blokade adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memutus perdagangan dan hubungan dengan pelabuhan tertentu atau dengan garis pantai yang dimiliki oleh musuh (Holtzoff, Januari 1916). Sedangkan menurut William R. Kennedy jika dilihat dari perspektif militer maka blokade digambarkan sebagai operasi pengepungan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan atau mempercepat wilayah yang ditempati untuk segera

diserahkan ke pihak yang melakukan blokade, baik wilayah maritim, udara maupun darat (Kennedy, 1908).

Blokade dalam pengertian kontemporer adalah kegiatan menghentikan atau memblokir pantai musuh atau bagian dari pantai musuh dengan tujuan untuk mencegah keluar masuknya pesawat atau kapal laut dari negara lain. Sedangkan dalam pengertian lama atau tradisional, blokade adalah bentuk pencegahan akses kendaraan laut untuk masuk dan keluar dari pelabuhan musuh yang dilakukan oleh suatu negara. Blokade dilakukan untuk mencegah musuh mendapatkan pasokan senjata dan distribusi militer lain dari luar dengan tujuan agar pada akhirnya kekuatan militer musuh melemah dan mudah untuk dilumpuhkan.

Tanda-tanda dari tindakan blokade yang digunakan pada era modern biasanya berfokus pada pembatasan sektor ekonomi negara. Kemudian ciri yang kedua adalah dengan adanya pembatasan wilayah teritorial, laut, udara dan darat terhadap negara yang sedang diblokade. Blokade wilayah biasanya dilakukan oleh militer, contoh sederhana dari blokade laut (*naval blockade*) adalah negara yang sedang memblokade wilayah akan menempatkan kapal perang di wilayah yang agak jauh dari bibir pantai negara yang diblokade (International Institute of Humanitarian Law, 1994). Ciri ketiga ditunjukkan dengan luasan/jangkauan wilayah yang diblokade adalah keseluruhan kota, atau lebih luas lagi sehingga menciptakan efek keterbatasan yang besar bagi negara yang diblokade (Arfakhsyadz, 2011).

Pembatasan sektor ekonomi atau blokade ekonomi dilakukan dengan menghentikan pasokan atau distribusi perdagangan yang masuk ke negara yang diblokade. Negara akan mengalami kekacauan apabila sektor ekonomi tidak dapat berjalan. Mengingat bahwa

hampir semua negara di dunia melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan. Sumber perekonomian seperti gas, minyak, bahan bakar dan makanan dalam skala besar hanya mungkin di distribusikan melalui jalur pelayaran. Maka ketika semua terhenti maka kekuatan sebuah negara akan melemah.

Berdasarkan tiga dasar pemikiran yang telah disampaikan di atas maka dapat dilihat bahwa Arab Saudi dan pemerintah Yaman bekerja sama dalam berbagai hal tidak terlepas dari adanya Selat Bab el Mandeb sebagai sektor geopolitik yang strategis bagi Arab Saudi. Selat Bab el Mandeb inilah yang terhubung dengan Laut Merah sebagai wilayah bagian barat Arab Saudi. Selat Bab el Mandeb juga merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan jalur laut selatan melewati Laut merah dan menembus Afrika menuju Eropa melalui terusan Suez. Hal inilah yang kemudian menjadikan Arab Saudi melakukan blokade terhadap Yaman yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Arab Saudi menginginkan dengan melakukan blokade terhadap Yaman makan segala aktivitas ekspor impor yang dilakukan Yaman melalui Selat Bab el Mandeb akan terganggu, begitu pula dengan pasokan kebutuhan kelompok Houthi. maka penguasaan Saudi terhadap wilayah Laut Yaman akan dapat memaksa mundur kelompok Houthi dari pengaruhnya terhadap Yaman. Kemenangan Arab Saudi terhadap Houthi maka akan mempermudah Arab Saudi memanfaatkan Selat Bab el Mandeb dengan pemerintah Yaman yang ada di pihak Arab Saudi.

Selain itu blokade Arab Saudi terhadap Yaman disebabkan karena faktor kondisi domestik Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara kerajaan dengan mayoritas penduduk meyakini/menganut paham Sunni, paham yang sama dianut sebagian besar masyarakat Yaman (pemerintah Yaman). Hal ini bertolak belakang dengan Houthi yang

beraliran Syiah. Perbedaan dasar ideologi ini yang kemudian menyebabkan kondisi dalam negeri Arab Saudi tidak sepakat dengan konflik yang dilatarbelakangi oleh kelompok Houthi. Kemudian konflik bersenjata yang terjadi di Yaman secara langsung akan mengganggu keamanan Arab Saudi. Hal ini disebabkan karena Yaman adalah negara yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi di sebelah utara. Selain itu, kelompok Houthi beberapa kali melakukan serangan ke Arab Saudi sebagai bentuk provokasi militer. Oleh sebab itu Arab Saudi melakukan blokade di wilayah perairan Yaman untuk menekan kelompok Houthi. Alasan lainnya jika dilihat dari konteks internasional adalah keterlibatan Iran dalam mendukung kelompok Houthi dianggap akan menghalangi Arab Saudi dalam melakukan kerja sama dengan Yaman apabila Yaman dikuasai oleh Houthi. Persamaan ideologi Syiah antara Iran dan Houthi dikhawatirkan akan mengguncang stabilitas regional dengan adanya sengketa antar sekte Sunni dan Syiah.

D. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan di atas maka asumsi dasar dalam menjelaskan alasan Arab Saudi melakukan blokade terhadap Yaman sebagai berikut.

- a. tekanan dan opini publik dari masyarakat Arab Saudi yang mayoritas Sunni menentang pemberontakan Houthi yang beraliran Syiah.
- b. kondisi ekonomi dan militer Arab Saudi yang kuat dinilai cukup dalam menghadapi Houthi
- c. Arab Saudi khawatir dengan Iran yang ikut terlibat dalam mendukung kelompok Houthi.
- d. secara geopolitik Arab Saudi tertarik dengan Selat Bab el Mandeb yang terhubung dengan Laut Merah sebagai jalur laut perdagangan internasional dan juga Yaman merupakan negara yang berbatasan

langsung dengan Arab Saudi yang memiliki potensi kerja sama dalam mengolah sumber daya alam.

E. Metode Penelitian

Proses pencarian dan pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian ini banyak didukung oleh literasi kepustakaan dalam teknik pengumpulan data, sehingga eksplorasi data bersifat studi kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, pengumpulan data akan dilakukan melalui kajian literasi seperti media pustaka, majalah, surat kabar, jurnal dan sumber rilis resmi pemerintah, buku, laporan penelitian, *working paper*, berita, dan penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk mendapatkan data yang *up to date*, akan banyak didukung melalui persediaan data yang ada di internet maupun sumber lain yang diyakini masih mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang dikaji. Sedangkan hasil penelitian ditulis dengan metode deskriptif, yaitu menceritakan atau mendeskripsikan kembali data-data yang diperoleh.

F. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus kajian pada alasan blokade Laut Arab Saudi terhadap ketahanan pangan di Yaman yang menyebabkan adanya krisis kelaparan dan peningkatan jumlah kematian. Penulis mengambil rentang waktu dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Tahun 2015 diambil karena menjadi tahun awal Blokade laut mulai dilakukan oleh Arab Saudi di Laut Merah. Sedangkan tahun 2018 diambil karena sampai tahun tersebut blokade masih berjalan dan juga alasan kemudahan pencarian data yang mendukung penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dan dibagi dalam lima bab dan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini akan diulas mengenai, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini akan diulas mengenai sejarah Arab Saudi dan Dinamika hubungan Arab Saudi dengan Yaman

Bab III : Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah Yaman dan dinamika yang terjadi di negara tersebut.

Bab IV : Pada bab ini akan diulas mengenai faktor-faktor mengapa Arab Saudi melakukan blokade terhadap Yaman

Bab V : Merupakan bab penutup yang akan mengambil poin penting dari setiap bab. Semua bahasan yang telah dibahas sebelumnya akan dirangkum di bab ini menjadi sebuah kesimpulan.